

# DEMOKRATISASI DI NEGARA MUSLIM: TRANSISI MENUJU DEMOKRASI PADA MASA REFORMASI 1998 DI INDONESIA DAN GEJOLAK REVOLUSI MESIR 2011

Oleh: Haura Atthahara  
Email: [h.atthahara@gmail.com](mailto:h.atthahara@gmail.com)

## Abstrak

Krisis ekonomi dan politik dalam sistem pemerintahan otoriter yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang merajalela. Problem-problem sosial tersebut membuat lahirnya gerakan sosial yang dilakukan mulai dari aktivis mahasiswa hingga ribuan masyarakat yang melakukan demonstrasi turun ke jalan. Reformasi 1998 di Indonesia dan Arab Spring tahun 2011 di negara-negara timur tengah merupakan akibat yang terjadi dari perubahan sosial-politik di negara-negara muslim termasuk diantaranya Indonesia dan Mesir. Setelah terjadinya reformasi dan revolusi tersebut transisi menuju demokrasi merupakan masa yang diharapkan dapat membawa negara-negara tersebut dari sistem otoriterisme menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Bukan hanya menuntut penyelenggaraan pemerintahan demokrasi secara formal melainkan juga diharapkan dapat melahirkan demokrasi secara substansial.

**Keyword: Demokrasi, Arab Spring dan Reformasi**

## A. Pendahuluan

Transisi demokrasi di dunia Islam selalu ditandai dengan gejolak politik diantaranya runtuhnya rezim otoriterisme. Proses jatuhnya sebuah rezim ditandai dengan aksi sosial yang dapat melahirkan perubahan sosial yang tentunya banyak memakan korban demi terciptanya pemerintahan yang demokratis secara substansial. Banyaknya korban yang berjatuh akibat proses penggulingan rezim otoriter menunjukkan bahwa untuk mencapai demokrasi memerlukan biaya besar yang harus dibayar oleh warga negara. Di Indonesia dan Mesir proses tumbanganya sebuah rezim ditandai dengan beberapa faktor diantaranya faktor krisis ekonomi dan politik, tuntutan akan turunnya pemerintahan otoriter yang sedang berjalan sekian puluh tahun, dan tindakan represif pemerintah terhadap warga negara. Di Indonesia pada akhir dekade 1990-an terjadi krisis di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan akhirnya sampai di Indonesia. Di negara terakhir ini krisis ekonomi terjadi paling parah. Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebanyak 23 milyar AS sudah dijanjikan. Namun kurs rupiah atas dolar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka diatas Rp.10,000/1 dolar AS, lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF<sup>1</sup>. Persoalan menjadi bertambah besar karena krisis ekonomi menjalar pada krisis politik. Di Korea Selatan, pergantian penguasa terjadi melalui pemilu dimana pihak oposisi mengambil alih kekuasaan, sedangkan di Thailand dan Indonesia penguasa politik diturunkan di tengah jalan<sup>2</sup>.

Berbeda dengan Indonesia, Mesir di penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi *Arab's Spring* atau dengan nama *Jasmine Revolution* (Revolusi Melati)<sup>3</sup>. Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara Arab lainnya. Namun hanya

<sup>1</sup> Denny J.A, Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999, hal 3

<sup>2</sup> Ibid, hal 2

<sup>3</sup> Tamburaka Apriadi . 2011. *Revolusi Timur-Tengah*. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 75

beberapa Negara saja yang berhasil menjatuhkan pemimpin negaranya seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Revolusi yang kemudian menggoncang stabilitas politik dan menjalar begitu cepat di kawasan Timur Tengah yang diberi nama Revolusi Melati adalah suatu istilah yang diberikan oleh orang-orang Timur Tengah untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga Melati yang sedang mekar. Bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum, dan simbol dari ekspresi kesucian dan ketulusan kasih sayang. Negara-negara yang bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah tangkai yang berada satu di Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu persatu kuncup itu mulai mengeluarkan baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi. Secara demikian demonstrasi di Mesir terinspirasi oleh revolusi yang sukses di Tunisia, dimana ribuan orang mulai turun ke jalan untuk memprotes kemiskinan, pengangguran yang merajalela, korupsi pemerintah dan pemerintahan otoriter dari Presiden Hosni Mubarak, yang telah lama memerintah negara tersebut. Peristiwa yang terjadi di Mesir merupakan kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini paralel dengan krisis politik di Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera menggulingkan rezim Mubarak, setelah aksi demonstrasi di Mesir, akhirnya Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 11 Februari 2011<sup>4</sup>. Mengacu pada hukum sebab-akibat, *Arab spring* di kawasan Timur-Tengah bukan tanpa sebab, dikarenakan suatu peristiwa yang dimulai dari suatu alasan untuk melakukannya. Demikian pula rakyat yang melakukan perubahan sosial memilih alasan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dinilai korup, otoriter, dan menyebabkan termajinalkannya kehidupan rakyat baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh rakyat merepresentasikan gerakan *people power* sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial politik dan terciptanya demokrasi.

## B. Pokok Permasalahan

Dalam tulisan ini ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perbandingan pada masa transisi menuju demokrasi pada masa Reformasi 1998 di Indonesia dan Revolusi Mesir tahun 2011 lalu. Pertama, apakah yang menyebabkan terjadinya Reformasi 1998 di Indonesia dan Revolusi 2011 di Mesir. Jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 di Indonesia merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia dimana saat itu pemimpin yang sudah 32 tahun memimpin dengan cara otoriter akhirnya berhasil diturunkan. Sama halnya dengan di Indonesia pada saat penggulingan Soeharto, Penggulingan rezim Hosni Mubarak di Mesir yang sudah berkusa selama 30 tahun merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah politik negara Mesir. Untuk itu akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan rezim Soeharto dan Hosni Mubarak turun.

Kedua, apa saja yang dilakukan pemerintah pada masa transisi menuju demokrasi setelah runtuhnya rezim otoriter. Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah dimana pengangkatan Habibie sebagai presiden hingga pemilu 1999 dilakukan, dan apa saja yang dilakukan oleh militer pada masa transisi menuju demokrasi di Mesir. Ketiga, bagaimana kaitan islam dalam hal ini *civil* islam dan demokrasi itu sendiri. Indonesia dan Mesir merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama islam. Meskipun islam tidak dijadikan dasar negara, umat muslim di dua negara tersebut secara langsung ikut mewarnai dunia politik di negara-negara tersebut. Adanya anggapan bahwa demokrasi tidak cocok diterapkan di negara muslim bahkan Raja Fahd mengatakan demokrasi tidak cocok dengan rakyat Saudi Arabia<sup>5</sup>. Sesungguhnya, meningkatnya partisipasi gerakan-gerakan Islam dalam proses

<sup>4</sup> Ibid, hal 97

<sup>5</sup> Leon T. Hadar. What Green Peril ?, (dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 192

demokratisasi pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an terus bergerak menuju pusat-pusat kekuasaan. Kecenderungan semacam ini mengakibatkan masalah tentang kesesuaian antara Islam dan Demokrasi, terutama karena demokrasi didasarkan pada sekulerisme, sedangkan Islam adalah agama yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan<sup>6</sup>. Untuk itu perlu dijelaskan mendalam bagaimana hubungan islam dan demokrasi yang sebenarnya terjadi di negara-negara tersebut.

### C. Tinjauan Pustaka

Sistem politik menurut Thomas Magstadt<sup>7</sup> dapat diklasifikasi kedalam berbagai bentuk. Klasifikasi yang paling umum yaitu menitikberatkan pada pemusatan (pemisahan) kekuasaan atau tingkat ekonomi dan berdasarkan pada pembangunan politik disuatu negara tersebut. Klasifikasi berdasarkan kekuasaan yaitu sistem politik demokrasi, sistem politik otoriter, dan sistem politik totaliter. Sedangkan klasifikasi berdasarkan pembangunan politik yaitu negara berkembang dan negara maju. Menurutnya pembagian sistem politik seperti Sistem presidensial, parlementer, rezim otoriter dan totaliter yang digambarkan dalam buku *Nation and Government* (1998:27)<sup>8</sup> adalah merupakan konstruksi teoritik yang pada prakteknya tidak ada yang sama sekali mirip dengan bentuk sistem politik di negara-negara. Namun, dapat digunakan dalam diskusi untuk membahas perbedaan bentuk pemerintahan sebelum lanjut untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kongkritnya.

Thomas Magstadt<sup>9</sup> selanjutnya menjelaskan bahwa ada berbagai macam bentuk pemerintahan otoriter, tetapi terdapat beberapa karakteristik-karakteristik yang umum diantaranya kelas elit yang memiliki *link* dengan penguasa. Tujuan utama kelas penguasa yaitu adalah untuk mempertahankan status quo. Dalam sistem ini partisipasi masyarakat senagaja dibuat sangat sedikit bahkan diabaikan dan militer memiliki peran kunci pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem otoriterianisme dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk-bentuk, dimana tidak ada satupun yang dapat mengakomodasi berbagai kasus secara relevan. Tetapi secara umum rezim otoriter memiliki beberapa bentuk diantaranya: seorang pemimpin yang diktator (tirani), oligarki militer, dan rezim dinasti (monarki) menurut Aristoteles<sup>10</sup>. Tirani memiliki tiga tujuan dasar diantaranya; 1, mematahkan semangat warga negara, 2, melahirkan ketidakpercayaan satu sama lain (tirani tidak akan menjatuhkan hingga seseorang dapat memulai kepercayaan kepada orang lain, 3. Membuat warga negara tidak dapat melakukan aksi-aksi. Tidak semua pemimpin diktator merupakan tirani tetapi seringkali pemimpin diktator berasosiasi dengan politik yang represif dan memiliki peraturan yang sewenang-wenang dan pemerintahan diktator biasanya menyandarkan diri pada militer sebagai tameng terhadap dirinya. Oligarki militer dimana kekuasaan militer diakomodir secara institusional. Dalam sistem pemerintahan otoriter, hampir selalu ada sosok figur yang menjalankan fungsi simbolik dan seremonial sebagai kepala eksekutif. Berbeda dengan bentuk militer tirani, militer dalam oligarki kekuasaan dipegang secara kolegiat dan bukan personal. Dalam oligarki militer kekuasaan personal tidak sah secara institusional meskipun diktator itu sangat kuat. Dan yang terakhir adalah rezim dinasti. Kekuasaan dinasti atau monarki merupakan bentuk otoriterianisme yang paling umum dalam bentuk pemerintahan dalam abad ke 20. Kekuasaan monarki memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan tempatnya, biasa Raja, Khalif, Amir, Sultan dll. Dalam sistem ini seseorang berkuasa karena berdasarkan kelahiran atau keturunan. Di Eropa dan ditempat lainnya para sultan dan raja seringkali

<sup>6</sup> Abdillah Maskuri, (dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 192

<sup>7</sup> Magstadt, T. *Nations and Governments*. New York: St.Martin Press, 1998, hal 27

<sup>8</sup> Ibid, hal 27

<sup>9</sup> Ibid, hal 27

<sup>10</sup> Ibid, hal 38

menguatkan klaim kekuasaan terhadap dirinya merupakan kekuasaan kehendak tuhan atau yang sering dikenal dengan *devine right to rule*<sup>11</sup>.

Demokrasi tersusun dari dua kata —”demos” berarti *people* dan “kratos” berarti *rule or authority* (bahasa Greek, Yunani); yang berarti pemerintahan oleh *rakyat (rule or authority by the people)* di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan di bawah sistem pemilihan yang bebas. Didefinisikan sebagai *government of the people, by the people, for the people* atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat<sup>12</sup>. Dari pengertian sederhana tersebut jelas bahwa demokrasi menginginkan pemerintahan diselenggarakan secara terbuka dan rakyat diberi kesempatan dalam memerintah. Sedangkan demokratisasi merupakan tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan dan politik yang semakin marak diserukan oleh rakyat dalam pemerintahan di seluruh penjuru dunia<sup>13</sup>. Modernisasi dan teknikalisis yang merambah masyarakat di seluruh bagian menyebabkan semakin banyak orang mampu mengakses informasi tanpa sensor. Dalam masyarakat industri, dan juga di dunia ketiga, semakin tumbuh terhadap kebencian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan yang tampaknya “tidak bersentuhan dengan rakyat” atau represif. Baik dalam pemerintahan rezim otoriter, berhaluan kiri atau kanan, maupun dalam pemerintahan yang diakui demokratis semakin banyak rakyat yang menuntut pemberdayaan dan partisipasi. Tuntutan-tuntutan ini melahirkan gerakan-gerakan bagi demokratisasi dan perubahan struktur pemerintahan<sup>14</sup>.

Seorang ahli analisis tentang demokrasi, Robert A. Dahl, di mana kehidupan demokrasi tidak cukup digerakkan dengan prosedur atau metode semata. Demokrasi, dalam pandangan Robert A. Dahl mesti mengandung dua dimensi terbaik dalam hal kontestasi dan partisipasi. Tatanan politik yang terbaik bagi masyarakat bukanlah demokrasi semata melainkan *polyarchy*. Tipologi system politik menurut Robert A. Dahl ditentukan dari bekerjanya kompetisi dan partisipasi dalam kehidupan politik. Menurut Dahl, sistem yang demokratis (*polyarchy*) memiliki 7 indikator<sup>15</sup>, yaitu:

1. Setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam memilih pemimpin.
2. Setiap warga negara mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu.
3. Pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilu yang teratur, adil, dan bebas.
4. Kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik terpilih.
5. Jaminan kebebasan dasar dan politik
6. Adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu.
7. Adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Demokrasi bisa berjalan dengan baik jika ditegakannya pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar demokrasi<sup>16</sup> antara lain (a), kedaulatan rakyat, (b), pemerintahan berdasarkan persetujuan, (c), kekuasaan mayoritas, (d), hak-hak minoritas, (e), jaminan hak-hak asasi

<sup>11</sup> Ibid, hal 38

<sup>12</sup> Istilah tersebut menurut Abraham Lincoln dalam Effendi, Bahtiar. Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (Ed),. *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Paramadina, Jakarta. Cet. I, 1996, hal 86

<sup>13</sup> Esposito, John L. Islam and Democracy (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung, 1999, hal 14

<sup>14</sup> Ibid, hal 14

<sup>15</sup> Robert A. Dahl. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemah oleh A. Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. Hal. 173.

<sup>16</sup> Basrowi dan Suko Susilo, Demokrasi dan Ham. (Kediri : Jengala Pustaka Utama, 2006) dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 197

manusia (f), pemilihan yang bebas dan jujur (g), persamaan didepan hukum (h), proses hukum yang wajar (i), pembatasan pemerintah secara konstitusional, (j), pluralisme agama dan (k), nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Untuk menjawab pokok permasalahan yang sudah disebutkan diawal, dibawah ini akan dijelaskan mengenai tiga pokok permasalahan yang akan dijawab melalui peristiwa yang terjadi di masing-masing negara.

## **D. Pembahasan**

### **Reformasi 1998 di Indonesia**

#### **I. Faktor-faktor terjadinya Reformasi 1998**

Ribuan gedung terbakar, ratusan manusia terpenggang dan tewas seketika. Berbagai kota besar mulai dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Solo sampai Ujung Pandang menjadi lautan api. Ratusan Penduduk asing pergi meninggalkan Indonesia. Sementara warga negara Indonesia sendiri, yang kebetulan non-pribumi berada dalam kondisi yang sangat ketakutan akibat teror dan kekerasan. Kondisi itu sangat mencekam tak ubahnya seperti sedang berlangsungnya sebuah perang sipil<sup>17</sup>.

Kondisi mencekam tersebut dikarenakan akibat dari adanya gerakan demonstransi terhadap tuntutan terhadap perubahan sistem ekonomi dan politik secara substansial dari berbagai kalangan. Di Indonesia pada akhir dekade 1990-an terjadi krisis di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dimulai dari Thailand, kemudian meluas ke Malaysia, Korea Selatan dan akhirnya sampai di Indonesia. Di negara terakhir ini krisis ekonomi terjadi paling parah. Pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta. Paket dari IMF sebanayak 23 milyar AS sudah dijanjikan. Namun kurs rupiah atas dolar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka diatas Rp.10,000/1 dolar AS, lebih rendah dari periode sebelum paket bantuan IMF<sup>18</sup>. Persoalan menjadi tambah besar karena krisis ekonomi menjalar pada krisis politik.

Pada masa Soeharto saat itu ABRI, Birokrasi dan Golkar merupakan mesin politik yang digunakan Soeharto untuk mempertahankan sistem pemerintahan otoriterinya. Soeharto memperluas dan memperdalam peranan tentara sehingga menyebar serta memasuki hampir semua bidang kehidupan mulai dari politik (eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal), birokrasi (para menteri, dirjen, sekjen dan duta besar), hukum dan lembaga peradilan, ekonomi (pimpinan perusahaan-perusahaan negara), sampai bidang olahraga (pimpinan KONI dan cabang-cabang olahraga. Soeharto sengaja menciptakan anti terhadap politik dan kekuasaan pada umumnya serta ideologi golongan serta partai-partai pada khususnya dengan kampanye “politik *no* pembangunan *yes*” yang sebenarnya merupakan cara Soeharto agar masyarakat anti terhadap politik dan tetap memilih Golkar bukan PDI ataupun PPP karena hanya ada tiga partai pada saat itu<sup>19</sup>. Selain itu konstitusi UUD 45 mengandung cacat yang mendasar seperti di dalam konstitusi menyatakan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara yang akan mengangkat presiden. Sementara keanggotaan MPR akan ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan UU dibuat oleh DPR bekerjasama dengan presiden<sup>20</sup>. Bagaimana mungkin keanggotaan MPR yang akan memilih presiden itu ditentukan oleh presiden sendiri. Dengan kata lain pada saat itu Soeharto secara tidak langsung mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden. Selain itu partiiipasi politik dikurangi, jumlah partai politik sangat dibatasi dan kekuatan oposisi masyarakat dikontrol melalui kebijakan korporatisme. Sementara pemerintahan yang kuat dan oposisi yang lemah dan kontrol publik lemah mengakibatkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela.

<sup>17</sup> Denny J.A, Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press, 1999, hal 15

<sup>18</sup> Ibid, hal 3

<sup>19</sup> Djafar, Z. Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun. Jakarta: UI Press,2005, hal

42

<sup>20</sup> Opcit, hal xiv



Selain itu pada bulan April 1998, gerakan mahasiswa berulang-ulang menjadi berita media massa di tanah air. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dengan jaket almamaternya masing-masing bergabung menjadi satu. Berbagai aksi keprihatinan berulang-ulang digelar, mulai dari Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai ke Ujung Pandang. Berbagai universitas negeri terkemuka terlibat seperti UI,ITB,UGM ditambah dengan beberapa mahasiswa swasta lainnya. Slogan yang dikumandangkanpun beragam, namun seputar reformasi ekonomi dan politik. Gerakan mahasiswa seperti ini terjadi pada tahun 1966, 1974, 1978 namun pada 1998 merupakan gerakan mahasiswa yang terbesar diantaranya jika diukur dari krisis ekonomi politik yang melatar belakangnya, luasnya berita pers baik domestik ataupun internasional, frekuensi gerakan, serta jumlah mahasiswa yang terlibat<sup>21</sup>. Saat itu gerakan mahasiswa bercampur dengan aneka kekuatan *civil society* lain menuntut perubahan sistem yang kemudian berubah menjadi gelombang sejarah berupa runtuhnya sistem ekonomi politik yang tidak demokratis dan pro ekonomi pasar.

## II. Masa Transisi Menuju Demokrasi

Setelah pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, terjadi masa transisi dimana B.J.Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden atas pilihannya. Selama setahun ia menjabat presiden, ia berjalan bersama dengan tuntutan akan kebebasan pers, reformasi undang-undang politik, dan menggelar pemilu pada 7 Juni 1999. Kemudian yang dilakukan Habibie pada masa transisi adalah pada April 1999 menyetujui referendum di Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri yang telah lama menderita. Dalam memutuskan kebijakannya ini, Habibie dibantu oleh Dewi Fortuna Anwar (salah seorang penasihatnya yang reformis)<sup>22</sup>.

Pemilu Juni 1999 berhasil berjalan dengan damai. Meskipun terdapat 48 partai ikut pemilu, hanya lima partai yang muncu sebagai pemenang. Yang teratas, PDI-P, dilanjutkan Golkar, PKB, PPP dan PAN. PDI-P meraih suara sekitar 35%, hampir dua kali perolehan Golkar, secara bersama-sama partai Mega (PDI-P), partai Abdurrahman Wahid (PKB), partai Amien Rais (PAN), dan partai-partai reformis lainnya memperoleh 60% suara<sup>23</sup>. Dan pada tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid dari NU terpilih sebagai Presiden. Hari berikutnya, Megawati Soekarno terpilih sebagai Wakil Presiden. Amin Rais sebagai ketua MPR terpilih berapa hari kemudian<sup>24</sup>. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ketiga orang tersebut merupakan tokoh-tokoh pejuang Reformasi 1998.

## III. Masyarakat Sipil Penopang Demokrasi

Perlu adanya kelompok masyarakat sipil yang turut membangun tradisi demokrasi dan keadaban publik, serta berpendirian sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap negara. Robert W. Hefner menyebut kekuatan ini sebagai “Civil Islam”<sup>25</sup>, karena sebagai kekuatan masyarakat sipil mereka menganggap kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi tidak hanya milik Barat, melainkan juga bagian dari prinsip-prinsip yang ditegaskan di dalam Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi keislaman terbesar yang memainkan peran-peran masyarakat sipil, yang secara vertikal melakukan kontrol terhadap negara, di samping melakukan pemberdayaan masyarakat secara horizontal. Peran-peran ini sangat membantu dalam transisi demokrasi. Terlebih kedua organisasi ini tegas dalam

<sup>21</sup> Ibid, hal 7

<sup>22</sup> W.Hefner, Robert, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: ISAI, 2000, hal 346

<sup>23</sup> Ibid, ha 348

<sup>24</sup> Ibid, hal 351

<sup>25</sup> Robert W. Hefner, *Public Islam and the Problem of Democratization*, *Journal Sociology of Religion*, Volume 62 No. 4, Oxford University Press, 2011) dalam Zuhairi Misrawi, *Ekspresi Politik Umat Islam*, Jakarta: Maarif, 2013, hal 159

membela Pancasila dan melakukan otokritik terhadap kelompok-kelompok yang mengusung formalisasi Syariat<sup>26</sup>.

## Revolusi Mesir

### I. Faktor-faktor yang menyebabkan revolusi mesir

Di penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi *Arab's Spring* atau dengan nama *Jasmine Revolution* (Revolusi Melati)<sup>27</sup>. Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara Arab lainnya. Namun hanya beberapa Negara saja yang berhasil menjatuhkan pemimpin negaranya seperti Tunisia, Mesir dan Libya. Isu yang dibawa oleh rakyat Mesir juga merupakan isu yang hampir sama oleh Tunisia itu sendiri. Yaitu isu tentang perekonomian dan kepemimpinan Hosni Mubarak sebagai Presiden Mesir yang memerintah secara otoriter. Awal mula demokratisasi Mesir hampir sama dengan pemicu demokratisasi Tunisia, yaitu tewasnya seorang warga Mesir bernama Said Khaleed akibat dianiaya oleh aparat pemerintah Mesir. Setelah kasus meninggalnya Khaleed, membuat seorang rakyat Mesir bernama Weel Gholum<sup>28</sup>, yang bekerja di Dubai sebagai Eksekutif Marketing perusahaan *Google* kembali ke Mesir dan membuat sebuah pergerakan bawah tanah untuk melakukan revolusi melalui media sosial. Aksi Gholum dalam berbagai media sosial yang mengajak warga Mesir lainnya untuk melakukan demokratisasi mendapat banyak respon dari warga-warga Mesir yang lain. Hal ini dikarenakan dalam berbagai media sosial yang digunakan oleh Gholum, terdapat berbagai alasan-alasan untuk melakukan demokratisasi. Perekonomian dan politik otoriter Hosni Mubarak merupakan salah satu contoh alasan tersebut. Dalam proses demokratisasi Mesir, tidak semua berjalan dengan baik. Jaringan internet baik itu melalui komputer ataupun dari *handphone* diputuskan sepihak oleh pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir menanggapi hal ini sebagai sebuah ancaman adanya revolusi. Namun kebijakan pemerintah dalam memutuskan jaringan internet justru membuat warga Mesir semakin ingin menurunkan pemerintahan Hosni Mubarak yang dinilai telah melanggar kebebasan untuk berbicara warganya sendiri. Aksi unjuk rasa semakin membesar dengan bantuan Gholum dalam memanfaatkan peran *Google* nya dalam menyambung kembali jaringan internet Mesir sebagai alat untuk merangkul dan mengajak ribuan warga-warga Mesir untuk berkumpul melakukan demonstrasi secara besar-besaran di Tahrir Square.

Di bidang ekonomi Mubarak memimpin sebuah periode stabilitas dalam negeri dengan kediktatorannya, dan memonopoli ekonomi Mesir. Korupsi yang kian parah menyebabkan ketidak-stabilan di bidang ekonomi Mesir. Menurut data IMF, pertumbuhan PDB per kapita Mesir berjalan stagnan dari tahun 1989 hingga 2008, rata-rata PDB per kapita Mesir sedikit berubah, dari 2.155 dolar AS pada tahun 1989 menjadi 2.160 dolar AS pada tahun 2008<sup>29</sup>. Ini merupakan yang terburuk diantara tiga belas negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan negara-negara teluk. Segala permasalahan yang menyebabkan ketidak-stabilan ekonomi di Mesir mengakibatkan harga bahan pangan yang terus meningkat, kemiskinan yang terus bertambah, lapangan pekerjaan yang minus. Semua permasalahan diperparah dengan tekanan dari rezim terhadap rakyat dimana kebebasan berekspresi yang dikekang sedemikian rupa, kepastian hukum yang buruk. Hal ini telah meledakkan kesabaran

<sup>26</sup> Ibid, hal 59

<sup>27</sup> Tamburaka Apriadi . 2011. *Revolusi Timur-Tengah*. PT Buku Seru: Jakarta. Hal 75

<sup>28</sup> Ibid, hal 76

<sup>29</sup> Fernando, Femi dan Harto, Syafri, Faktor-faktor yang Menyebabkan Hosni Mubarak Turun dari Kursi Kepresidennya (2011), 2013, hal 2

rakyat Mesir selama 30 tahun kepemimpinan Mubarak. Rezim otoriter dan represif ini telah mengakumulasi kebencian jutaan rakyat Mesir terhadap sang presiden mereka sendiri, yang lain untuk melakukan demokratisasi menurunkan Presiden Hosni Mubarak.

Dalam bidang politik, di bawah kepemimpinan Mubarak, pemerintah Mesir tetap menjadi negara presidensial yang dalam pemilihan presiden, Mubarak memenangkan 94% suara tanpa kandidat lain dari oposisi (mendorong pers menyalahgunakan isu-isu dan perbedaan-perbedaan yang ada untuk memecahbelah bangsa; Majelis Rakyat dan birokrasi tetap didominasi oleh partai demokrasi nasional milik pemerintah; pemerintah memegang kontrol mutlak atas kelangsungan hidup partai-partai politik<sup>30</sup>. Selain itu adanya usaha-usaha Mubarak untuk melumpuhkan kekuatan oposisi dengan tindakan-tindakan represif. Pemerintah Mubarak mulai tidak pandang bulu dan memperluas perangnya sehingga tidak lagi hanya memusuhi kaum militan bawah tanah semacam Jamaah Islamiyah dan Jamaah Al-Jihad, dengan melakukan pelecehan dan pemenjaraan demi mengendalikan kekuatan yang semakin berkembang, dan menentang gerakan-gerakan Islam moderat seperti Ikhwan-Al-Muslimin<sup>31</sup>.

Selain kebobrokan dalam bidang sosial dan politik, terjadi berbagai pelanggaran HAM dibawah kepemimpinan Mubarak. Dalam perangnya melawan terorisme tindakan tegas pemerintah dan penahanan massal terhadap tokoh-tokoh moderat beserta para anggota keluarga tersangka, dalam upaya membungam dan menakut-nakuti semua oposisi. Pada tahun 1989, 10.000 aktivis militan Islam ditahan. Ribuan lain ditahan tanpa tuduhan, Organisasi Hak Asasi Manusia Arab menuduh Pemerintah telah melakukan siksaan rutin<sup>32</sup>. Selain itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan lainnya adalah melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan terhadap ratusan tahanan, penggunaan pengadilan militer untuk mereka yang didakwa sebagai teroris dan kegagalan untuk menghukum para perwira yang bertanggungjawab atas penyiksaan itu<sup>33</sup>.

## II. Masa transisi menuju Demokrasi

Kepercayaan terhadap sebuah institusi memiliki makna yang strategis bagi kebelangungan dan kelancaran proses transisi. Dalam kasus Mesir, institusi yang dipercaya untuk memimpin Mesir pada masa transisi tersebut adalah Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (*Supreme Council of the Armed Forces – SCAF*). Angkatan Bersenjata (AB) Mesir memang sudah memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dari pada lembaga kepolisian (keamanan). AB Mesir dipersepsikan sebagai lembaga profesional yang mengedepankan keselamatan negara<sup>34</sup>. Penunjukan SCAF sebagai penguasa sementara (*carateker*) segera mendapatkan penerimaan yang luas dari rakyat. Fenomena ini tidak aneh jika memperhatikan latar belakang reputasi SCAF. Terlebih lagi, reputasi dimaksud tetap dijaga oleh Angkatan Bersenjata (AB) Mesir dengan mengambil posisi dan sikap yang sangat persuasif dan simpatik terhadap para demonstran selama gerakan revolusi 25 Januari 2011 berlangsung. Terbentuknya Deklarasi konstitusional II<sup>35</sup> merupakan pemantapan dari deklarasi konstitusional I. Deklarasi kedua menjadi semacam “Konstitusi Interim” yang memuat 63 pasal, termasuk pasal-pasal yang diamandemen melalui referendum, dan mengatur berbagai aspek ketatanegaraan Mesir serta kekuasaan transisional. Pokok-pokok

<sup>30</sup> Esposito, John L. *Islam and Democracy* (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung, 1999, hal 243

<sup>31</sup> Ibid, hal 240

<sup>32</sup> Ibid, hal 250

<sup>33</sup> Ibid, hal 250

<sup>34</sup> A.M.Fachir. 2011. Jurnal luar negeri. Gerakan Rakyat Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur-Tengah. Jakarta: BPKP. Hal. 17

<sup>35</sup> Ibid, hal 19



amandemen yang tercakup dalam konstitusi interim ini, sesuai hasil referendum, pelonggaran mekanisme pencalonan presiden, pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 periode berturut-turut), pengembalian fungsi supervisi penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan pemilu/referendum untuk menjamin asas bebas/jurdil, pembatasan pemberlakuan keadaan darurat (6 bulan dan selanjutnya harus melalui referendum), dan pengaturan mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif mendatang.

Saat itu Mesir berada dalam kendali pemerintahan konstitusi sementara yang dipegang oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan saat ini juga dalam masa transisi kepemimpinan, Secara umum proses transisi belum berjalan secara transparan dan inklusif, tidak ada yang tahu bagaimana sebuah undang-undang dibuat dan juga tidak ada dialog yang berarti didalam proses transisi undang-undang dan masalah-masalah lainnya. Namun demikian memang sudah ada beberapa perubahan positif seperti: fasilitasi pembentukan partai politik ; fasilitasi untuk calon presiden; para pemilih dapat memberikan suara dengan hanya menunjukkan KTP, pembatasan masa jabatan presiden; pembatasan campur tangan pemerintah dalam serikat pekerja; pembatasan campur tangan polisi dalam proses pemilu dan memastikan dilakukannya pengawasan terhadap hakim.

Tahun 16-17 Juni 2012 adanya Pemilu yang mempertemukan Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan dan Syafiq dari Partai Nasional Demokrat yang telah dibubarkan karena murupakan partai tunggangan Mubarak. Pemilu dilakukan dalam dua putaran dengan hasil Mursi dari Partai Kebebasan dan Keadilan yang merupakan partai Ikhwanul Muslimin dengan 52,74% dan Syafiq sebesar 47,26%.<sup>36</sup>

### III. Masyarakat Sipil Penopang Demokrasi

Absennya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang secara mendorong demokrasi merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam. Di Mesir, kelompok masyarakat sipil tidak begitu kuat dan tidak mengusung gagasan demokrasi secara konsisten. Berbeda dengan Indonesia yang mempunyai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang aktif mendorong lahirnya demokrasi, bahkan secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi<sup>37</sup>. Setelah kembali pada 1970-an Ikhwan Al-Muslimin dengan tegas memutuskan untuk berpartisipasi dalam (sistem politik yang ada) dari pada melancarkan revolusi dengan kekerasan; Ikhwan memanfaatkan demokrasi untuk mengkritik pemerintahan, untuk mencapai tujuannya atau untuk mendukung perjuangan islam sebesar-besarnya<sup>38</sup>. Dari sini terlihat bahwa Ikhwan hanya memanfaatkan demokrasi untuk memperjuangkan nilai-nilai islam dan bukan untuk menopang demokrasi secara murni.

#### Analisis

Dalam menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia dan Mesir sebelum terjadinya reformasi 1998 dan Revolusi Jasmin di Timur Tengah yang mengakibatkan Revolusi Mesir pada tahun 2011 dari keduanya terdapat kesamaan yaitu adanya krisis ekonomi besar-besaran yang mengakibatkan banyaknya pengangguran bagi warga negara. Keadaan kisis ekonomi ini diperburuk dengan adanya krisis politik yang terjadi dimana sistem pemerintahan yang otoriter serta berkuasa sangat kuat terhadap rakyat. Dibatasinya partisipasi politik warga negara, pers yang dikontrol penuh oleh pemerintah, dan tindakan represif yang dilakukan

<sup>36</sup> Anggia, Denda, Partai Kebebasan dan Keadilan Dalam Pemilu 2012 Mesir, UIN Sunan Kalijaga, 2013, hal 5

<sup>37</sup> Zuhairi Misrawi, Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif, 2013, hal 160

<sup>38</sup> Esposito, John L. *Islam and Democracy* (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung, 1999, hal 246

oleh negara dalam menentang tindakan warga negara yang cenderung menempatkan diri sebagai oposisi bagi negara. Di Indonesia, Soeharto menggunakan ABRI dengan dwifungsinya serta menjadikan ABRI sebagai sandaran pertahanan pemerintahan. Sama dengan Indonesia, Mesir menggunakan Militer dan Polisi sebagai alat untuk melakukan represif bagi warga negara maupun kelompok gerakan sosial yang berani menentang pemerintah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Thomas Magstardt<sup>39</sup> bahwa ada berbagai macam bentuk pemerintahan otoriter, tetapi terdapat beberapa karakteristik-karakteristik yang umum diantaranya kelas elit yang memiliki *link* dengan penguasa. Tujuan utama kelas penguasa yaitu adalah untuk mempertahankan status quo. Dalam sistem ini partisipasi masyarakat senagaja dibuat sangat sedikit bahkan diabaikan dan militer memiliki peran kunci pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.

Teori Deprivasi Relatif Situmorang<sup>40</sup> dimana adanya tekanan yang dimaksud bukan diakibatkan oleh diskrepansi struktural, tetapi berasal dari kondisi perasaan yang subjektif, orang merasa relatif gagal menggapai harapannya. Kebutuhan yang terpenuhi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan kondisi ekonomi dan politik, yang membesarkan harapan bagi beberapa kelompok, akan mudah memunculkan gerakan sosial apabila realitas tampak tidak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi apabila ada problem-problem sosial. Ada beberapa problem sosial yang disebutkan oleh para ilmuan sosial sebagai sumber perubahan<sup>41</sup>; 1. *Poverty* (kemiskinan). Kemiskinan adalah problem yang melibatkan orang banyak. 2. *Crimes* (kejahatan). Kejahatan bisa berjenjang-jenjang dari *blue collar* hingga *white collar crimes*. *White collar crimes* misalnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh para ustadz, eksekutif, birokrat, politisi dan yang setingkat dengan mereka. 3. *Conflict* atau pertikaian. Konflik bisa bersifat rasial, etnis, sektarian, ideologis dan sebagainya. Di Indonesia, yang terjadi pada saat reformasi 1998 merupakan perubahan sosial dimana pembaruan sistem sosial, politik dan ekonomi yang bertahap<sup>42</sup>. Karena itu gerakan reformasi yang ada di Indonesia ingin mendisiplinkan lembaga-lembaga yang menyimpang, misalnya pemerintahan atau *offending institutions* (lembag-lembaga yang mengganggu, yang berdosa, dan yang kita anggap sebagai penyebab masalah sosial kita)<sup>43</sup>.

Berbeda dengan yang terjadi di Inonesia, perubahan sosial di Mesir merupakan revolusi atau *people's power*. *Revolusi* atau *people's power* merupakan bagian dari *power strategy* (strategi perubahan sosial dengan kekuasaan). Dan revolusi merupakan puncak dari semua bentuk perubahan sosial. Karena ia menyentuh segenap sudut dimensi sosial secara radikal, massal, cepat, mencolok, dan mengundang gejolak intelektual dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya<sup>44</sup>. Revolusi sosial adalah perubahan mendasar dalam struktur sosial maupun politik yang berlangsung bersamaan dan masing-masing saling memperkuat satu sama lain. Perubahan ini berlangsung melalui konflik sosial-politik yang kuat yang didalamnya perjuangan kelas memainkan peranan kunci<sup>45</sup>. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dan Mesir dimana Reformasi 1998 di Indonesia merupakan perubahan struktur sosial-politik secara bertahap dan revolusi Mesir 2011 merupakan perubahan struktur sosial-politik secara cepat dan massal.

<sup>39</sup> Magstardt, T. *Nations and Governments*. New York: St.Martin Press, 1998, hal 27

<sup>40</sup> Situmorang, *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa perlawanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal16

<sup>41</sup> Dalam Rakhmat, *Rekayasa Sosial*. Bandung: Remaja rosd karya,1999, hal 57

<sup>42</sup> Ibid, hal 44

<sup>43</sup> Ibid, hal 84

<sup>44</sup> Ibid, hal 53

<sup>45</sup> Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial*, Jakarta:Erlangga, 1991, hal 2

Transisi menuju demokrasi yang dilakukan oleh dua negara agak berbeda namun memiliki substansi yang sama yaitu dimulai dengan perubahan konstitusi. Jika setelah Soeharto turun maka yang menggantikan adalah wakilnya yaitu B.J.Habibie, maka ketika Hosni Mubarak turun maka yang memimpin Mesir pada saat transisi adalah militer atau SCAF. Ketika pada masa transisi banyak hal yang dilakukan oleh Habibi meskipun hanya satu tahun menjabat kearah perubahan menuju demokrasi diantaranya kebebasan pers, reformasi undang-undang politik, dan menggelar pemilu pada 7 Juni 1999. Kemudian yang dilakukan Habibie pada masa transisi adalah pada April 1999 menyetujui referendum di Timor-Timur untuk menentukan nasib sendiri yang telah lama menderita. Sedangkan yang dilakukan oleh SCAF diantaranya fasilitasi pembentukan partai politik ; fasilitasi untuk calon presiden; para pemilih dapat memberikan suara dengan hanya menunjukkan KTP, pembatasan masa jabatan presiden; pembatasan campur tangan pemerintah dalam serikat pekerja; pembatasan campur tangan polisi dalam proses pemilu dan memastikan dilakukannya pengawasan terhadap hakim.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada masa transisi tersebut sudah sesuai dengan indikator<sup>46</sup>demokrasi, yaitu setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam memilih pemimpin, mempunyai persamaan hak dipilih dalam pemilu, pemilihan pejabat publik diselenggarakan melalui pemilu yang teratur, adil, dan bebas, kontrol kebijakan dilakukan oleh pejabat publik terpilih, jaminan kebebasan dasar dan politik, adanya saluran informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu serta adanya jaminan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.

Indonesia dan Mesir merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam. Lantas, bagaimana hubungan islam dan penyelenggaraan demokrasi di masing-masing negara tersebut dan apakah akan bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran islam. Ada dua pemikir yang mulai membentangkan jalan kepada demokrasi, yaitu Fahmi Huwaydi dan Yusuf al-Qaradhawi<sup>47</sup>. Huwaydi menegaskan, bahwa Islam dan demokrasi merupakan sesuatu yang bersifat *taken for granted (al-ma'lum bi al-dharurah)*. Umat Islam tidak mungkin hidup tanpa ajaran Islam, sebagaimana ia juga tidak bisa hidup tanpa demokrasi. Tanpa Islam, umat Islam akan kehilangan ruh, sedangkan tanpa demokrasi, umat Islam akan mengalami kegagalan. Sedangkan al-Qaradhawi menyatakan, pada hakikatnya, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Ia menganalogikan demokrasi dengan imam shalat. Seseorang dapat diangkat menjadi imam shalat jika para makmum menghedaki dan rela menjadi imam. Pandangan yang lain dari al-Qaradhawi perihal pentingnya demokrasi, yaitu Islam sangat menentang otoritarianisme, yang membuktikan Islam telah membentangkan jalan menuju demokrasi. Otoritarianisme dalam sejarah kemanusiaan telah menjadi penyebab maraknya ketidakadilan dan korupsi. Karena itu, demokrasi menjadi sistem terbaik untuk menentang otoritarianisme.

Dalam konsepsi Islam dikenal dengan enam kaidah-kaidah dalam menopang tegaknya demokrasi<sup>48</sup>, antara lain: Pertama, ta'aruf dan saling mengenal (sesuai dengan QS. Al-Hujûrah, 49: 13). Kedua, syûra atau musyawarah (sesuai dengan QS. As-Syûra, 42:38). Ketiga. Ta'awun atau kerjasama (sesuai dengan QS. Al-Maidah, 5:2) Keempat, Maslahah atau menguntungkan masyarakat, kata ini berakar pada kata shalih yang berarti kebaikan

<sup>46</sup> Robert A.Dahl. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2001. Hal.173.

<sup>47</sup> Dalam Zuhairi Misrawi, Ekspresi Politik Umat Islam, Jakarta: Maarif, 2013, hal 151

<sup>48</sup> 68Idris Thaha, Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais (Jakarta : Teraju, 2005 dalam Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011), hal 21

pada umumnya dan menguntungkan. Kelima, adl atau adil (sesuai dengan QS. An-Nisa, 4:58). Sesungguhnya Islam lebih dulu memancang sendi-sendi bangunan substansi demokrasi, tapi rincinya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim sesuai dengan dasar-dasar agama, kemaslahatan dunia, dan perkembangan hidupnya, menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan dunia. Jadi ada baiknya jika mengambil pemikiran, sistem, metode, dan aturan yang bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan *nash* yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap. Pendapat diatas didukung oleh Salim Ali Bahnasawi<sup>49</sup> bahwasanya demokrasi tidak bertentangan dengan dunia Islam, sebab Islam menetapkan bagi manusia kebebasan memilih keyakinan. Jika memilih keyakinan merupakan kebebasan, maka memilih pemimpin pun demikian juga.

Akseptabilitas para pemikir muslim terhadap demokrasi ini merupakan modal yang sangat penting bagi transisi demokrasi. Meskipun harus diakui, tantangannya juga tidak kecil, karena para ulama umumnya masih menentang keras sekularisme. Padahal, dalam demokrasi liberal, sekularisme menjadi sebuah paham yang niscaya dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bersifat substantif. Namun dapat kita simpulkan bahwa demokrasi bukan merupakan hal yang bertentangan dengan islam dan penerapannya di Indonesia maupun di Mesir hingga saat ini masih dalam masa pembelajaran menuju demokrasi yang substantif dan terpenuhinya hak-hak sipil

### **E. Kesimpulan**

Proses transisi menuju demokrasi yang dialami oleh negara berpenduduk mayoritas muslim seperti di Indonesia dan Mesir tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan negara yang adil, makmur dan sentosa dengan menggunakan ‘payung’ demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dengan adanya fatwa dari para ulama Islam yang menyatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran islam sehingga Islam sebaga agama yang *Rahmatan Lil Alamin* atau rahmat bagi seluruh alam dapat dirasakan.

Islam sebagai negara yang menjunjung perdamaian sangat menolak pemimpin yang bersifat otoriterianisme apalagi yang cenderung totalitarianisme. Namun demikian penerapan demokrasi bukanlah akhir dari perjuangan sebuah negara untuk mewujudkan negara yang aman dan sejahtera namun dengan adanya demokrasi, diperlukan pembelajaran terus-menerus dalam pemerintahan demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **Daftar Pustaka**

- Anggia, Denda.2013. Partai Kebebasan dan Keadilan Dalam Pemilu 2012 Mesir, UIN Sunan Kalijaga
- A.M.Fachir.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP
- Denny J.A.1999. Jatuhnya Soeharto dan Transisi ke Demokrasi, Jakarta, Jayabaya University Press
- Djafar, Z. 2005. Soeharto: Mengapa Kekuasaannya Dapat Bertahan Selama 32 Tahun. Jakarta: UI Press
- Esposito, John L. 1999. *Islam and Democracy* (diterjemahkan oleh Rahmani Astuti) dengan judul Demokratisasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Praktek. Mizan, Bandung

---

<sup>49</sup> Ibid, hal 21

- Fernando, Femi dan Harto, Syafri.2013. Faktor-faktor yang Menyebabkan Hosni Mubarak Turun dari Kursi Kepresidennya (2011)
- Magstadt, T.1998. *Nations and Governments*. New York: St.Martin Press
- Situmorang. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa perlawanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, (Ed),1996. *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Paramadina, Jakarta. Cet. I
- Rakhmat, 1999 *Rekayasa Sosial*. Bandung: Remaja rosda karya
- Robert A.Dahl. 2001.Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Diterjemah oleh A.Rahman Zainudin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Rusdin, Islam dan Demokrasi dalam Perspektif Fatimah Mernisi, 2011
- Skocpol, Theda.1991. *Negara dan Revolusi Sosial*, Jakarta:Erlangga
- Tamburaka Apriadi . 2011. *Revolusi Timur-Tengah*. PT Buku Seru: Jakarta
- W.Hefner, Robert, *Civil Islam: Islam dan Demokratisai di Indonesia*, Jakarta:ISAI, 2000
- Zuhairi Misrawi.2013. *Ekspresi Politik Umat Islam*, Jakarta: Maarif